

Kompetensi Guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusif di Sekolah Inklusi Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

Purwanti Retno Yuliasut

Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Julei_julie@yahoo.co.id

Abstrak: Pendidikan inklusif merupakan reformasi dari pendidikan yang berkembang di Indonesia. Perkembangan implementasi pendidikan inklusif juga diikuti oleh perkembangan regulasi melalui Permendikbud No. 70 Tahun 2009, meskipun sekolah-sekolah yang dirujuk sebagai sekolah inklusi belum menjalankan pendidikan inklusif sebagaimana mestinya, di mana siswa berkebutuhan khusus tidak dapat terserap karena ketidaksiapan sekolah untuk melayani. Penelitian ini bertujuan mengetahui kompetensi guru dalam melihat tantangan dari implementasi pendidikan inklusif di Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan deskripsi kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan guru-guru Sekolah Dasar yang tergabung pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kulon Progo. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kompetensi guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusi melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan yang meliputi kegiatan pendataan anak berkebutuhan khusus, sosialisasi program dan penyediaan sumber daya. Tahap pelaksanaan program meliputi kegiatan pelaksanaan pembelajaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan layanan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus, tahap terakhir ialah tahap monitoring dan evaluasi. Terdapat faktor pendukung implementasi program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus yaitu faktor lingkungan dan faktor komunikasi. Lingkungan sekolah menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus, adanya partisipasi orangtua untuk memantau perkembangan anak mereka, dan adanya kemudahan akses bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Faktor komunikasi yaitu terjalannya komunikasi yang baik di lingkungan intern dan ekstern sekolah. Faktor penghambat yaitu faktor sumber daya baik itu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang masih belum memadai.

Kata kunci: inklusif, komunikasi, kompetensi guru.

Abstract: Inclusive education is a reform of education that is developing in Indonesia. The development of the implementation of inclusive education was also followed by the development of regulations through Permendikbud No. 70 of 2009, although schools that are referred to as inclusive schools have not implemented inclusive education as they should, where students with special needs cannot be absorbed due to the unpreparedness of schools to serve. This study aims to determine the competence of teachers in seeing the challenges of the implementation of inclusive education at the Elementary School Education Unit Level. This research is a qualitative description through observation and interviews with elementary school teachers who are members of the School for Inclusive Education in Kulon Progo. The results of this study note that the

competence of teachers in implementing the values of inclusive education through 3 (three) stages, namely the preparation stage which includes the data collection of children with special needs, program socialization and the provision of resources. The program implementation phase includes learning activities, capacity building for human resources, and advisory services for children with special needs, the last stage is the monitoring and evaluation stage. There are supporting factors for the implementation of inclusive education programs for children with special needs, namely environmental factors and communication factors. The school environment accepts the existence of children with special needs, the participation of parents to monitor the development of their children, and the availability of access for children with special needs in the school environment. The communication factor is good communication in the school's internal and external environment. The inhibiting factor is the factor of resources both human and non-human resources which are still inadequate.

Keywords: *inclusive, communication, Teacher's Competence*

Pendahuluan

Pendidikan inklusif merupakan implementasi dari hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Atas dasar hal tersebut maka konsekuensi logis hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak menerima pendidikan tanpa mendiskriminasikan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, termasuk untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan mendapatkan pendidikan khusus. Atas kebutuhan yang beragam maka sekolah inklusi mempunyai peran untuk menanggapi kebutuhan dari seluruh siswa melalui pembelajaran yang mengedepankan partisipasi siswa, budaya masyarakat, serta meminimalisir praktek eksklusif. Madeline Will dalam buku Sekolah Inklusif (2012: 43) menuliskan bahwa REI (Reguler Education Initiative) mengusulkan restrukturisasi pendidikan Amerika ke dalam suatu sistem tunggal dalam memberikan layanan bagi semua siswa. Will menegaskan dengan menyatukan pendidikan khusus dan reguler, satu “tanggung jawab bersama” akan tercipta sehingga akan melayani anak-anak tanpa stigma label-label diagnostik atau kelas-kelas yang terpisah. Dengan demikian perlu adanya adaptasi yang berkaitan dengan isi, pendekatan, struktur, dan strategi pendidikan untuk dapat melakukan pendidikan yang dapat memberikan fasilitasi berdasarkan kebutuhan anak yang beragam. Sekolah merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan formal bagi semua orang. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan formal seperti apa yang diharapkan. Hal itu terjadi karena ada perbedaan perlakuan bagi beberapa orang, dalam hal ini adalah para anak difabel atau anak-anak dengan kebutuhan khusus. Anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali ditolak untuk masuk ke sekolah biasa di mana anak-anak normal bersekolah.

Penolakan oleh sekolah-sekolah ini dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah: a) Letak sekolah khusus yang biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) yang jauh dari tempat tinggal siswa dengan kebutuhan khusus tersebut jarak yang jauh dan sulitnya sarana transportasi menuju ke SLB. b) Ketidakmampuan sekolah umum untuk mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK) karena pola berpikir mereka bahwa anak dengan kebutuhan khusus harusnya disekolahkan di SLB. c) Tidak ada guru khusus yang menangani ABK, karena semua guru di sekolah umum bukan lulusan dari

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*"Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa
Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*

Yogyakarta, 28 September 2019

jurusan sekolah luar biasa. Dikarenakan jurusan yang banyak ditempuh oleh para pendidik di sekolah dasar pada umumnya adalah pendidikan umum atau mata es menangan anak berkebutuhan khusus hanya ada di sekolah luar biasa. d) Tidak ada sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelangsungan belajar siswa ABK di sekolah biasa misalnya ruangan inklusif yang digunakan untuk melayani ABK baik di kala jam pelajaran normal atau sepulang sekolah. e) Paradigma orang tua ABK yang menganggap bahwa jika anak mereka disekolahkan di SLB adalah anak cacat.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menggunakan pendekatan dengan melihat sistem pendidikan dalam rangka memberikan respon atas keberagaman semua anak. Hal ini perlu adanya pengkondisian yang memungkinkan guru dan siswa merasa nyaman atas keberagaman yang ada. Keberagaman perlu dipandang sebagai tantangan yang perlu direspon secara bersama-sama, daripada sebagai suatu masalah. Untuk itu guru perlu mendesain ruang kelas dan lingkungan pembelajaran untuk dimungkinkan dapat diakses oleh semua siswa. Guru perlu mempunyai keleluasaan waktu dan tenaga untuk mengembangkan profesionalitas dan praktek pembelajaran secara berkesinambungan. Pada dasarnya, anak ABK sama seperti anak normal lainnya yang membutuhkan perhatian dan pendidikan yang layak. Hanya saja, ada kelebihan-kelebihan yang membedakan mereka. Anak ABK tidak selalu anak yang lamban belajar, akan tetapi juga anak yang kecepatan menyerap ilmu yang diberikan guru lebih cepat dari anak normal lainnya. Anak ABK tidak selalu anak yang kekurangan secara fisik, akan tetapi anak yang fisiknya normal dengan kekurangan yang ada. Anak tersebut bisa saja mengalami disleksia (kesulitan membaca dan menulis), susah berkonsentrasi dan hiperaktif. Maka dari itu, pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan mimpi Indonesia akan kejayaannya di masa yang akan datang. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak (normal) lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat, terdapat anak normal dan anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas di mana anak tersebut tinggal. Maka dari itu, karakter pendidikan yang inklusif perlu ditanamkan kepada para ABK tersebut agar mereka mampu menghadapi kehidupan nyata mereka di masa yang akan datang. Salah satu cara menempuhnya adalah dengan memodifikasi kurikulum sekolah dan materi pembelajaran yang diajarkan.

Tujuan dari penelitian ini agar guru, calon guru, pemerhati pendidikan, orang tua dan masyarakat lebih dapat berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif sesuai dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Guru sebagai pilar utama terwujudnya pendidikan di sekolah harus mempunyai kompetensi yang mawadahi dan pengetahuan mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia agar dapat memfasilitasi pembelajaran bagi siswa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan deskripsi kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan guru-guru Sekolah Dasar yang tergabung dalam Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2019 dengan mengambil sampel yaitu guru-guru Sekolah Dasar yang tergabung dalam Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kulon Progo yang

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*"Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa
Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*

Yogyakarta, 28 September 2019

berjumlah 80 guru Sekolah Dasar baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Guru yang ditunjuk adalah guru yang belum pernah mengikuti Diklat Pendidikan Inklusi yang diselenggarakan oleh Dikpora Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian tentang kompetensi guru Sekolah Dasar dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusi di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kulon Progo ini untuk mendeskripsikan apakah guru-guru telah melakukan prosedur pelaksanaan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusi kepada peserta didiknya atau belum. Sebagaimana pendapat Nurul Zuriah (2005: 47) penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini berusaha mengkaji, menguraikan dan mendeskripsikan data-data tentang implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Kulon Progo.

Prosedur dalam pengambilan data adalah guru mendapat tabel mengenai nilai-nilai pendidikan inklusi dan memasukkan ke dalam 3 kategori seperti tabel berikut :

STRUKTUR	Hubungan	Semangat
<ul style="list-style-type: none">•••••	<ul style="list-style-type: none">•••••	<ul style="list-style-type: none">•••••

Guru memasukkan nilai-nilai inklusi yang meliputi hak asasi, kasih sayang, komunitas, terpercaya, kesetaraan, menghormati keberagaman, keberanian, keberlanjutan, cinta, tanpa kekerasan, keindahan, kegembiraan, optimisme, kejujuran dan partisipasi. Hal tersebut untuk mengetahui apakah guru di Sekolah Inklusi memahami dan menerapkan nilai-nilai inklusi tersebut kepada peserta didik yang selanjutnya dapat membuat analisis program untuk semua siswa. Teknik analisis data dengan membuat prosentase mengenai pemahaman guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesiapan dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah suatu hal yang wajib dilakukan pertama kali, karena dari kesiapan itulah suatu instansi sekolah dapat menunjang kegiatan-kegiatan lainnya. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kulon Progo menerima anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak biasa di kelas yang sama. Upaya kesiapan sekolah ini di mulai dari tenaga pengajar, kurikulum yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan khusus anak dan fasilitas penunjang lainnya. Sekolah inklusi tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Kulon Progo siap untuk memberikan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan lingkungannya dalam kegiatan belajar mengajar, menunjang agar anak tidak minder dengan anak normal lainnya dan penanaman karakter bangsa serta penunjang lainnya. Terlebih dahulu kita memahami pengertian dan batasan-batasan pendidikan inklusi ataupun sekolah inklusif yang dikembangkan di Indonesia. Perkembangan dunia

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*"Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa
Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*

Yogyakarta, 28 September 2019

pendidikan di negara kita ini nampak dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mulai membuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan disabilitas. Meskipun undang-undang mengenai disabilitas belum cukup menampung keberagaman dan kemerdekaan belajar dari setiap individu yang unik. Sebagai wadah/ lembaga pendidikan, seyogyanya sekolah inklusif mampu memberikan akses yang sama dan menguntungkan untuk semua siswa. Sekolah Inklusif sebagai wadah yang menampung kurikulum, siswa dan guru ini memerlukan asesmen dan penelitian yang berkelanjutan, sehingga kesiapan tiga elemen (kurikulum, siswa dan guru) mampu berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Seorang guru senantiasa dituntut menjadi tenaga profesional yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan, meskipun sekarang ini masih terlihat bahwa sebagian orang cenderung menyatakan guru sebagai suatu profesi namun sebagian lagi tidak mengakuinya. Dari hasil pengamatan mengenai miskonsepsi pendidikan Inklusi masih terdapat pernyataan responden yang menjelaskan pendidikan inklusi disamakan dengan Anak Berkebutuhan Khusus. Guru-guru di Sekolah Inklusi sudah menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusi namun 40% masih belum dapat menerapkan di kelas masing-masing. Guru yang sudah memahami akan membuat program yang disesuaikan dengan keberagaman yang tampak di dalam kelas yaitu dengan membuat tahapan-tahapan sebagai berikut: tahap persiapan yang meliputi kegiatan pendataan anak berkebutuhan khusus yaitu dengan menggali informasi dari orang tua, pelaporan hasil belajar pada tingkat satuan sebelumnya yaitu Pendidikan Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak- Kanak (TK) serta mengamati selama proses penerimaan siswa baru yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian, guru melakukan sosialisasi program kepada pihak sekolah melalui kepala Sekolah, sesama tim pengajar dan Orang tua maupun siswa itu sendiri serta penyediaan sumber daya yang diperlukan seperti media belajar, tim yang kuat dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Tahap pelaksanaan program meliputi kegiatan pelaksanaan pembelajaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan layanan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus, tahap terakhir ialah tahap monitoring dan evaluasi. Tahap evaluasi ini tentunya berkelanjutan yang mendukung peserta didik untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terdapat faktor pendukung implementasi program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus yaitu faktor lingkungan dan faktor komunikasi. Faktor lingkungan menjadi hal yang sangat penting karena harus berlaku secara universal untuk keberagaman anak. Sekolah dan guru tentunya memperhatikan kebutuhan tempat belajar yang mendukung agar proses belajarnya nyaman bagi siswa maupun guru itu sendiri. Lingkungan sekolah menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus sehingga tidak ada nilai diskriminatif dan perlakuan khusus yang akan merugikan sebagian pihak dan menguntungkan sebagian yang lain, sehingga nilai partisipatif dan keadilan dapat diterapkan bahwa adil tidak sama dengan sama, adanya partisipasi orangtua untuk memantau perkembangan anak mereka melalui penerimaan hasil belajar siswanya setiap satu semester sekali, dan adanya kemudahan akses bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Faktor komunikasi yaitu terjalannya komunikasi yang baik di lingkungan intern dan ekstern sekolah. Faktor penghambat yaitu faktor sumber daya baik itu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang masih belum memadai.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*“Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa
Menghadapi Revolusi Industri 4.0”*

Yogyakarta, 28 September 2019

Dalam hal meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru di sekolah inklusi, guru dalam melaksanakan program belajar mengajar memerlukan lebih daripada sekedar keterampilan. Berikut yang dilakukan seorang guru di sekolah inklusi untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya serta menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusi di kelas yang diampunya, yaitu :

1. Guru menampilkan keandalannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Keandalan kerja itu dapat dilihat dari berbagai segi seperti mengetahui, memahami dan menerapkan apa yang harus dikerjakan sebagai guru. Kemudian juga memahami mengapa dia harus melakukan pekerjaan itu serta menghormati batas-batas kemampuan dan kewenangan profesinya dan menghormati profesi lain.
2. Berupaya untuk meningkatkan perkembangan siswa secara optimal dan beradaptasi dengan cepat dalam memahami keberagaman siswa.
3. Aktive dalam organisasi keguruan dan komunitas-komunitas keguruan untuk memperbarui informasi mengenai pendidikan di Indonesia.
4. Keyakinan agar tetap percaya diri dalam keadaan sulit sekalipun, terutama pada saat menghadapi siswa yang masih dalam masa belajar untuk memberikan suri tauladan kepada mereka.

Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Kulon Progo dalam menerapkan pendidikan karakter bangsa ini menggunakan sistem pendidikan integrasi, pendidikan integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal lainnya. Keterpaduan tersebut dapat bersifat menyeluruh, sebagian, atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi. Metode pelaksanaan pembelajaran ini yang dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter bangsa ialah siswa ABK di dampingkan dengan siswa yang normal, agar terjadi saling komunikasi atau menjalin pemahaman yang sama.

Sekolah yang tergabung dalam SPPI di Kabupaten Kulon Progo memiliki kurikulum yang sama dengan kurikulum Nasional. Sekolah di Kulon Progo masih menggunakan KTSP 2006 dan KTSP 2013. Kurikulum yang dirancang dari Standar Kompetensi (Kompetensi Inti) dan Kompetensi Dasar (SK/ KI-KD) dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dari SK/KI- KD tersebut kemudian disusun oleh masing-masing guru kelas dan guru mata pelajaran menjadi program pembelajaran berupa program tahunan, program semester, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Program pembelajaran yang disusun oleh guru untuk kelas inklusi juga menggunakan program pembelajaran yang sama dengan kurikulum nasional. Hal ini Karena peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di Sekolah yang tergabung di SPPI di Kabupaten Kulon Progo adalah peserta didik lamban belajar yang masih bisa mengikuti kurikulum nasional. Hanya saja peserta didik itu membutuhkan pembelajaran remedial agar dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Kebutuhan dalam melaksanakan kurikulum reguler yang di adaptasi perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum disekolah.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*“Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa
Menghadapi Revolusi Industri 4.0”*

Yogyakarta, 28 September 2019

Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Apabila sekolah tersebut memiliki konselor, psikolog dan ahli lain yang terkait maka ikut dilibatkan. Menurut (Rusman, 2009:29-30) adalah: 1) tingkat kematangan siswa (sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan kematangan siswa), 2) tingkat pengalaman siswa, 3) taraf kesulitan materi, yaitu disusun dari yang konkret menuju abstrak, dari yang mudah menuju ke yang susah, dari sederhana menuju ke yang kompleks. Tingkat kematangan siswa berkebutuhan khusus yang tidak sama dengan siswa-siswa lainnya tentu mengharuskan guru menyesuaikan dengan kemampuan siswa

Dalam buku pedoman Penyelenggaraan Inklusi Direktorat PSLB: a) Model kurikulum regular pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum regular sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya. b) Model kurikulum regular dengan modifikasi pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik lainnya. Di dalam model ini bisa terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaran berdasarkan kurikulum regular dan program pembelajaran individual (PPI). Misal seorang peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti 3 mata pelajaran berdasarkan kurikulum regular sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI. c) Model kurikulum PPI Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. (Sumber: Direktorat PSLB 34: 2004)

Model ini diperuntukkan pada siswa yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar berdasarkan kurikulum regular. Peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas regular sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhannya. Dari model pengembangan kurikulum di atas terlihat bahwa Sekolah yang tergabung dalam SPPI di Kabupaten Kulon Progo menggunakan model pengembangan kurikulum berdasarkan program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya, karena peserta didik lamban belajar yang ada di kelas inklusi masih bisa mengikuti kurikulum regular. Untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan peserta didik tersebut mendapatkan jam belajar tambahan dan pemberian motivasi. Kurikulum regular dapat juga digunakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus lainnya seperti peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa, atau autis yang tidak mengalami gangguan intelektual. Tujuan pengembangan kurikulum dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusi Direktorat PSLB: a) Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami peserta didik semaksimal mungkin dalam setting pendidikan inklusi. b) Membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rumah. c) Menjadi

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*"Penguatan Karakter Berbasis Literasi Ajaran Tamansiswa
Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*

Yogyakarta, 28 September 2019

pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program pendidikan inklusi. (Sumber: Direktorat PSLB 46: 2004)

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di Sekolah yang tergabung dalam SPPI di Kabupaten Kulon Progo mulai dari perencanaan Pembelajaran. Perencanaan yang dilakukan oleh guru meliputi: pertama, merencanakan pengelolaan kelas dengan menempatkan peserta didik lambat belajar pada barisan paling depan untuk memudahkan guru dalam memantau belajar siswa ketika guru sedang menyampaikan materi atau melaksanakan evaluasi. Kedua, guru merencanakan metode yang akan digunakan pada saat mengajar di kelas, menyiapkan materi yang akan disampaikan, menyiapkan bentuk tes dan soal yang akan digunakan dalam menyampaikan materi, dan menyiapkan bentuk tes dan soal yang akan dilakukan setelah materi selesai untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi.

Selanjutnya guru melaksanakan Pembelajaran di kelas inklusi, guru menyiapkan materi kepada peserta didik dengan metode, bahan ajar, media ajar, dan latihan soal yang telah direncanakan sebelumnya. Akan tetapi metode yang digunakan oleh guru belum bervariasi, guru masih lebih banyak menggunakan ceramah untuk menjelaskan isi materi, sedangkan metode lain seperti diskusi, demonstrasi dan lain-lain masih jarang dilakukan. Walaupun menggunakan kurikulum sekolah reguler, guru yang mengajar di kelas inklusi, hendaknya membuat rancangan program pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Pengajaran yang dilakukan oleh guru selama masa penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. Guru mengajar mata pelajaran yang sedang berlangsung pada hari itu dengan mengelompokkan siswa ABK dengan siswa normal lainnya dalam kelompok kecil (*peer teaching*) dan *cooperative learning* (pembelajaran berkelompok). *Peer teaching* dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan memasang siswa ABK dengan siswa yang pandai. Pengaturan pasangan ini bertujuan agar siswa ABK mendapatkan bantuan dengan teman sebayanya yang tentu saja tidak membuat ia canggung untuk meminta bantuan. Penyusunan kelompok dalam *peer teaching* ini dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan siswa yang mengalami lambat belajar atau kebutuhan khusus lainnya. *Peer teaching* dilaksanakan pada mata pelajaran yang berlangsung pada hari itu. Guru sebagai peneliti tidak menfokuskan kepada mata pelajaran tertentu. Tiga siswa berkebutuhan khusus yang berada di kelas 5 dengan kategori lambat belajar. Ketiga siswa dengan kategori lambat belajar tersebut diberi perintah masing-masing untuk duduk dengan siswa yang cerdas di kelas tersebut. Ketiga siswa ABK tersebut masing-masing memiliki kecerdasan rendah dengan keterampilan sikap yang kurang baik. Mereka suka mengganggu teman sekelas atau sibuk dengan dunia mereka sendiri dan tidak memperhatikan apa yang sedang diterangkan oleh guru. Siswa yang cerdas sebagai *peer teacher* mereka meskipun sempat menolak dan keberatan dengan perintah yang telah diberikan oleh guru menjalankan perintah dari guru dengan baik. Guru memberi pengertian kepada siswa yang cerdas agar mau membantu dan menerima siswa ABK sebagai teman sebangkunya hari itu. Siswa ABK yang diteliti dengan senang hati dan berwajah ceria menurut saja apa perintah guru. Mereka tidak berkomentar sedikit pun karena menganggap bahwa duduk dengan siswa yang cerdas merupakan keuntungan

atau kesempatan yang baik bagi mereka.

Guru tidak serta merta menunjuk dan memberi perintah kepada kedua jenis siswa yang berbeda tersebut untuk duduk bersama. Guru memberikan pengertian dan perintah kepada siswa ABK agar tidak mengganggu atau menjahili teman sebangkunya pada hari itu dan seterusnya. Guru menegaskan bahwa teman sebangku mereka pada hari itu adalah orang yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka hari itu, maka dari itu mereka tidak boleh berkata atau bersikap tidak baik kepada teman sebangku mereka.

Proses pembelajaran dengan metode *peer teaching* pada kenyataannya mampu membuat siswa ABK mengalami perubahan meskipun tidak begitu banyak. Hal ini terjadi karena proses penelitian yang seharusnya dilakukan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Siswa ABK pada akhirnya mampu untuk menjadi lebih baik di beberapa hal dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepadanya. Siswa ABK pada masa pertengahan observasi menunjukkan sikap-sikap yang diharapkan sesuai dengan karakter bangsa yang telah ditetapkan. Sikap yang mereka tunjukkan memang tidaklah sepenuhnya menunjukkan karakter yang ditetapkan, setidaknya mereka telah mulai merubah sikap mereka untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari.

Pembelajaran *cooperative learning* menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Anggota kelompok dalam *cooperative learning* ini ditentukan secara acak, maka dari itu siswa ABK dapat lebih berbaur dengan teman-teman yang lain. Secara umum, para siswa ABK mampu bekerja sama dengan teman-teman satu kelompok mereka untuk mencapai tujuan kelompok mereka bersama-sama dengan kompaknya. Mereka mampu mempraktikkan sikap demokratis ketika kelompok mereka akan mengambil keputusan untuk kebaikan bersama. Sikap yang menunjukkan oleh para siswa ABK tidak hanya mampu bekerja sama saja akan tetapi juga disiplin, tanggung jawab, toleransi, bersahabat, kreatif, menghargai prestasi dan juga memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik. Hal ini terlihat dalam partisipasi mereka di kelompok mereka masing-masing selama proses pembelajaran dan penelitian berlangsung. Para siswa ABK terlihat menikmati saat mereka berada dalam kelompok karena dengan berada dalam kelompok mereka mampu untuk menjadi siswa yang komunikatif. Komunikasi yang terbangun di antara mereka merupakan indikasi yang baik bagi keberhasilan penelitian. Kerja sama mereka juga merupakan hasil dari komunikasi yang baik di antara mereka. Mereka mampu menyamakan suara mereka untuk mencapai tujuan kelompok mereka secara bersama-sama. Tanggung jawab masing-masing anggota kelompok telah dijalankan dengan baik.

Melalui deskripsi kualitatif di atas, maka guru-guru yang tergabung dalam Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kulon Progo sudah memahami empat kompetensi yaitu Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional. Hal tersebut tampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selama observasi berlangsung.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) kesiapan sekolah termasuk di dalamnya tenaga pengajar, kurikulum yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan khusus anak dan fasilitas penunjang lainnya. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kulon Progo siap untuk memberikan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan lingkungannya dalam penanaman karakter bangsa, 2) Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dalam menanamkan pendidikan karakter bangsa ini berdampingan dengan siswa yang normal. Tindakan memasang siswa ABK dengan siswa normal, selain itu juga dilakukan pendekatan dengan kasih sayang, motivasi, memberi perhatian lebih tanpa membuat cemburu siswa regular lainnya. 3) Urgensi pendidikan karakter bangsa pada Sekolah yang tergabung pada SPPI Kabupaten Kulon Progo berupa interaksi siswa ABK sudah berjalan dengan baik, baik itu interaksi siswa ABK dengan siswa ABK, siswa ABK dengan teman sebaya, siswa ABK dengan guru, dan siswa ABK dengan lingkungan, meskipun masih ditemukan siswa ABK yang belum dapat berinteraksi dengan lingkungannya. 4) Kendala dan hambatan dalam menangani siswa ABK yakni terdapat orang tua yang belum mendukung terhadap program inklusif, belum ada assesmen khusus dalam menangani siswa ABK sedangkan pada proses pembelajaran, siswa ABK masih mendapatkan materi yang sama.

Hambatan lain yaitu belum terdapat bimbingan yang optimal dari pihak lain. Selain itu, perlu adanya pelatihan untuk menangani siswa ABK, oleh karena itu diperlukan guru pendampingan khusus (GPK) di sekolah inklusi serta peran Orang tua yang lebih aktif dalam mendukung siswanya agar program inklusif lebih efektif. Sehingga kompetensi guru pendidikan luar biasa dapat dikolaborasi dengan empat kompetensi guru sesuai yang tercantum pada Undang-undang yang berlaku yaitu meliputi Kompetensi Pedagogi, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Dirjendikdasmen. Hal 4
- Ika Leli Erawati, Sudjarwo, Risma Margareta Sinaga. 2016. Pendidikan Karakter Bangsa Pada Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusif. FKIP Universitas Lampung: Jurnal Sosial No 4 Tahun 2016
- Madeline Will. 2012. Konsep Sekolah Inklusi yang Humanis. Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan, Jakarta. Hal 43
- Nurul Zuriah. 2005. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan : teori, aplikasi. Jakarta : Bhumi Aksara. Hal 47
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 7. Jakarta: Kemendikbud.
- Rusman. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-ruzz Media. Hal 29-30.